

DAMPAK DARI KERJASAMA TRANS ASEAN GAS PIPELINE (TAGP) TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Oleh: Ricky Yudika Matondang

ricky.yudika@gmail.com

Pembimbing: Indra Pahlawan, S.IP, M.Si

Bibliografi: 10 Journal, 11 Book, 17 Document, 3 newspaper

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28294Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

ASEAN member states formulated that there should be a cooperation in the field of gas to maintain energy security. This study is a political economy that explains Indonesia's efforts of gas export activities to ASEAN member countries in 2011-2015 in the Trans ASEAN gas pipeline agreement. The Trans ASEAN gas pipeline agreement has been discussed since the 1970s but was officially codified in 1990. The ASEAN gas pipeline agreement was established because of the awareness of ASEAN member countries on the issue of energy security and the interests of Indonesia as one of the ASEAN member countries to utilize by effectiveness and efficiency to distribute natural resources for the national interest among ASEAN nation.

This research uses neo-liberalism as the perspective by James Rosenau. Neoliberalism contains an economic theory that is based on the use of open and free markets with little government intervention to prevent monopolies and other conglomerates from forming. This research use regionalization for level of analysis by Mohtar Mas'oed. This research also use international cooperation as concept by K.J Holsti. The sources in this study were obtained from library research and internet research.

Trans ASEAN gas pipeline emerged as one way for ASEAN member countries to meet the national energy needs in the gas field. in this agreement Indonesia as a country that has natural gas reserves sufficient to benefit from efficiency export and increase tax..

Keywords : Free Market, Trans ASEAN Gas Pipeline, Energy Security

I. Pendahuluan

Tulisan ini mengangkat sebuah tema kajian ekonomi politik internasional yang membahas tentang kepentingan Indonesia dalam kerjasama *Trans ASEAN Gas Pipeline* (TAGP). Kerjasama ini adalah salah satu visi *ASEAN Economy Community* yang bertujuan untuk menghubungkan jalur gas antar negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini diikuti seluruh negara yang menjadi anggota ASEAN dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan gas di kawasan regional Asia Tenggara. Berkembangnya dunia internasional telah berdampak pada perubahan di banyak negara di belahan dunia, misalnya seperti semakin banyaknya negara-negara yang melakukan hubungan antara negara yang satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasionalnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan, namun sektor migas masih sangat diandalkan dalam perekonomian nasional, baik sebagai penghasil devisa maupun pemasok kebutuhan energi dalam negeri.

Sebagai sumber penerimaan negara dan penyumbang devisa yang cukup besar dari hasil eksportnya, gas alam mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai sumber energi dan bahan baku industri. Gas alam menjadi komoditi yang lebih diandalkan dan lebih dapat dikembangkan di sektor pertambangan dan industri migas karena produksi gas alam lebih melimpah

dibandingkan dengan komoditi migas lainnya.

Terbangunnya jaringan interkoneksi penuh pipa tersebut dipertimbangkan oleh ASEAN harus terselesaikan pada tahun 2020, selanjutnya akan tercipta jaringan gas yang saling berhubungan di seluruh kawasan ASEAN dan hubungan antara permintaan dan pusat produksi di luar pipa yang telah dibangun antara negara-negara akan menjadi satu proyek pembangunan ekonomi.¹ Pembangunan proyek TAGP telah memberikan dampak yang signifikan pada integrasi pasar gas regional ASEAN secara keseluruhan.

Efisiensi energi dalam kawasan dapat terlihat dari beberapa keuntungan pada integrasi pasar gas alam, diantaranya: (1) Menambah pasokan keamanan energi dan mempromosikan diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak; (2) Membuat keuntungan dan memaksimalkan nilai kelebihan sumber daya gas alam di wilayah tersebut (contoh: Myanmar dan Indonesia); (3) Meningkatkan penghasilan pendapatan asing untuk negara pengekspor gas (misalnya untuk Myanmar dan Indonesia); (4) Menciptakan infrastruktur atau pasar gas lokal dan memutar perekonomian industri di kawasan; (5) Mempromosikan penggunaan gas alam sebagai bahan bakar yang lebih ramah lingkungan; dan (6) Mempromosikan kerja sama regional untuk meningkatkan keamanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi asing.² TAGP menjadi proyek yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara dan tidak

¹Dwiki Larasaty. "Meninjau Strategi Keamanan Energi Asean Melalui Tagp Menuju Interaksi Global", PAHMI 9th International Conference, Yogyakarta State University, 2015, hlm. 9, <http://eprints.uny.ac.id/27796/1/Dwiki%20Larasati.docx>.

²"The Trans-ASEAN Gas Pipeline – Accelerating Gas Market Integration within the ASEAN

Region", http://www.iapg.org.ar/WGC09/admin/arc_hivosNew/Special%20Projects/3.%20IGU%20GMI%20Guidelines/3.%20IGU%20GMI%20Guidelines%20FINAL%20-%20CD%20contents/Transasean.pdf, diakses 5 juli 2017. hlm 6-7

semua negara di Asia merupakan bagian dari Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP).

Kerangka Teori

Konsep keamanan energi (energy security) menjadi salah satu perhatian internasional dan menjadi salah satu bagian dari kebijakan politik luar negeri negara-negara di dunia. Sumber energi berupa minyak bumi, gas alam dan batu bara tidak hanya dinilai sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan produk pasar internasional, akan tetapi mempunyai nilai yang sangat strategis dalam kepentingan politik keamanan nasional dan internasional.

Peningkatan aktifitas ekonomi industri di seluruh negara di berbagai belahan dunia dan meningkatnya jumlah populasi dunia telah mengakibatkan peningkatan akan kebutuhan sumber energi meningkat drastis, sedangkan jumlah cadangan dan pasokan energi dari waktu ke waktu semakin terbatas dan menipis.³ Pada keadaan yang seperti ini ketergantungan antar-negara dalam pengamanan sumber sektor energi menjadi sangat penting, yang secara khusus negara-negara industri sangat bergantung kepada negara-negara penghasil sumber energi (minyak bumi, gas alam dan batu bara). Sikap saling ketergantungan antara negara-negara industri dengan negara penghasil sumber energi memiliki dua sisi mata uang yang berbeda.

Sikap saling ketergantungan terhadap pasokan energi tersebut berorientasi pada pentingnya sebuah kerjasama antar negara-negara industri dengan negaranegara penghasil sumber energi. Kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara industri dengan negara-negara penghasil sumber energi ialah

kegiatan kerjasama perdagangan hasil sumber energi.

Dalam pembahasan ini penulis menaruh fokus pada perjanjian kerjasama *Trans ASEAN Gas Pipeline* (TAGP) dan dampak kerjasama tersebut terhadap perekonomian Indonesia serta bagaimana kerjasama tersebut dapat memenuhi kebutuhan energi bagi negara anggota ASEAN.

II. ISI

Kondisi Energi Indonesia

International Energy Agency (IEA) mendefinisikan keamanan energi sebagai ketersediaan sumber energi tak terputus dengan harga terjangkau. Keamanan energi memiliki banyak aspek: keamanan energi jangka panjang terutama berkaitan dengan investasi tepat waktu untuk memasok energi sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan lingkungan.⁴ Di sisi lain, keamanan energi jangka pendek berfokus pada kemampuan sistem energi untuk bereaksi secara cepat terhadap perubahan mendadak dalam keseimbangan penawaran dan permintaan.

Tahun 2013, energi fosil menyumbang 94,3 persen dari total kebutuhan energi (1.357 juta barel setara minyak). Sisanya, 5,7 persen dipenuhi dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Minyak menyumbang 49,7 persen, gas alam 20,1 persen, dan batubara 24,5 persen. Separuh dari minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri harus diimpor, baik dalam bentuk minyak mentah (*crude oil*) maupun produk minyak. Dengan kondisi tersebut, ketahanan energi Indonesia tentu menjadi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi di pasar global.

³ Keamanan Energi Dalam Politik Luar Negeri Indonesia
<http://pascasarjana.umsida.ac.id/wp-content/uploads/2016/10/93->

Muchammad_Farid.pdf diakses pada 20 maret 2018

⁴*International Energy Agency*
<https://www.iea.org/topics/energysecurity/>
pada tanggal 4 mei 2018

Tahun 2014 Kementerian ESDM mencatat bahwa energy fosil masih mendominasi dalam konsumsi energi primer (tanpa biomasa tradisional). Konsumsi minyak bumi sebanyak 88 juta TOE (tonne of oil equivalent = setara ton minyak) atau 41,0% dari total konsumsi energy nasional. Jumlah konsumsi minyak bumi tersebut disusul oleh batubara sebanyak 69 juta TOE atau 32,3%, kemudian gas sebanyak 42 juta TOE atau 19,7%, biomasa modern sebanyak 6 juta TOE atau 2,9%, tenaga air sebanyak 5 juta TOE atau 2,5%, panas bumi sebanyak 2 juta TOE atau 1,1% dan listrik impor sebanyak 0,8 TOE atau 0,4%. Selama periode 2004-2014, konsumsi energy primer Indonesia meningkat dari 127 juta TOE menjadi 215 juta TOE.⁵ Hal ini menandakan adanya peningkatan sekitar 5,4% per tahun, namun demikian total pangsa Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2014 hanya mencapai sekitar 7,0%.

Sedangkan total produksi energi primer (batubara, gas bumi, minyak bumi dan EBT) Indonesia tahun 2015 adalah 2.848.025 ribu BOE (Barrel Oil Equivalent) dimana sekitar 1.887.366 ribu BOE diekspor ke luar negeri. Pada tahun yang sama Indonesia harus mengimpor energi sebesar 348.267 ribu BOE. Sebagian besar ekspor adalah batubara dan sebagian besar impor adalah minyak bumi, BBM dan LPG.⁶ Dari kondisi tersebut bisa diperoleh bahwa penyediaan energi primer Indonesia tahun 2015 adalah 1.308.926 ribu BOE termasuk perubahan stok (tanpa biomasa tradisional). Ekspor energi Indonesia pada tahun 2015 mencapai 66% dari produksi total energi atau lebih dari setengah. Sedangkan impor energi mencapai 27%

dari penyediaan energi primer total pada periode yang sama atau hampir sepertiga.

Cadangan terbukti minyak bumi tahun 2014 sebesar 3,6 miliar barel dan dengan tingkat produksi saat ini maka usianya sekitar 13 tahun. Sedangkan cadangan terbukti gas bumi tahun 2014 sebesar 100,3 TCF (Trillion cubic feet) dan akan bertahan selama 34 tahun.⁷ Usia cadangan migas, diasumsikan apabila tidak ada penemuan cadangan migas baru.

Potensi Energi Angin Indonesia

Pembangkit Listrik Tenaga Angin atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) telah banyak dimanfaatkan di berbagai negara, terutama di negara yang anginnya cukup kencang dan teratur dalam jangka waktu yang cukup lama, seperti Denmark. Tiongkok merupakan negara dengan PLTB kapasitas terbesar di dunia. Sekitar 45 GW energi yang dihasilkan dari sekitar 80 ladang kincir angin, dan Tiongkok memperbanyak ladang kincir angin hingga kapasitas 100 GW pada tahun 2015.

PLTB Sidrap merupakan pembangkit angin pertama di Indonesia yang akan beroperasi secara komersial. PLTB Sidrap merupakan pembangkit tenaga angin terbesar di Indonesia. Dengan kapasitas 75 MW, pembangkit ramah lingkungan ini terdiri dari 30 turbin kincir angin yang masing-masing berkapasitas 2,5 MW.⁸ Model turbin yang digunakan dari Gamesa Iolica Corporation pada menara baja setinggi 80 meter dengan panjang baling-baling 57 meter. Proyek dengan investasi sekitar 150 juta dolar AS ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2018 dioperasikan oleh PT UPC Sidrap Bayu Energi.

⁵ Indonesia Energy Outlook 2015. hlm. 15

⁶ Outlook Energi Indonesia 2016. hlm.12

⁷ Renstra Migas 2015-2019. hlm.16.

⁸ PLTB Sidrap, Pembangkit Listrik Tenaga Angin Terbesar di Indonesia

<http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/09/30/1759/pltb.sidrap.pembangkit.listrik.tenaga.angin.terbesar.di.indonesia> diakses pada 04 mei 2018

Potensi Energi Panas Bumi Indonesia

Pemanfaatan energi panas bumi untuk sektor non-listrik (*direct use*) telah berlangsung di Iceland sekitar 70 tahun. Meningkatnya kebutuhan akan energi serta meningkatnya harga minyak, khususnya pada tahun 1973 dan 1979, telah memacu negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dengan cara memanfaatkan energi panas bumi.⁹ Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di 24 Negara, termasuk Indonesia.

Kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia baru dilakukan secara luas pada tahun 1972. Direktorat Vulkanologi dan Pertamina, dengan bantuan Pemerintah Perancis dan New Zealand melakukan survey pendahuluan di seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil survey dilaporkan bahwa di Indonesia terdapat 217 prospek panas bumi, yaitu di sepanjang jalur vulkanik mulai dari bagian Barat Sumatera, terus ke Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan kemudian membelok ke arah utara melalui Maluku dan Sulawesi.

Survey yang dilakukan selanjutnya telah berhasil menemukan beberapa daerah prospek baru sehingga jumlahnya meningkat menjadi 256 prospek, yaitu 84 prospek di Sumatera, 76 prospek di Jawa, 51 prospek di Sulawesi, 21 prospek di Nusa Tenggara, 3 prospek di Irian, 15 prospek di Maluku dan 5 prospek di Kalimantan.¹⁰ Sistem panas bumi di Indonesia umumnya merupakan sistem hidrothermal yang mempunyai temperatur tinggi (>225°C), hanya beberapa diantaranya yang mempunyai temperatur sedang (150-225°C).

Emisi dari pembangkit listrik panas bumi sangat rendah bila dibandingkan dengan minyak dan batubara. Karena emisinya yang rendah, energi panas bumi

memiliki kesempatan untuk memanfaatkan *Clean Development Mechanism* (CDM) produk Kyoto Protocol. Mekanisme ini menetapkan bahwa negara maju harus mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 5.2% terhadap emisi tahun 1990, dapat melalui pembelian energi bersih dari negara berkembang yang proyeknya dibangun di atas tahun 2000.¹¹ Energi bersih tersebut termasuk panas bumi.

Kondisi Gas Indonesia

Produksi gas bumi Indonesia relatif meningkat sejak tahun 1970-an, meskipun akhir-akhir ini produksinya cenderung stagnan pada level kisaran 8.000 mmscf. Produksi gas bumi selama sepuluh tahun terakhir relatif fluktuatif, dengan rata-rata produksi sekitar 3,39 juta MMSCF (Millions Of Standard Cubic Feet) per tahun. Pada tahun 2012, produksi gas bumi ditargetkan 8.818 BCFD (*Billion Cubic Feet Per Day*), akan tetapi hingga akhir 2012, produksi gas bumi Indonesia hanya mencapai 8.196 MMSCFD (*Million Standard Cubic Feet per Day*) atau 92 persen dari target yang ditetapkan.¹² Dibandingkan dengan produksi gas 2011, produksi gas 2012 mengalami penurunan hingga 3 persen akibat adanya penurunan produksi alamiah di lapangan utama gas Indonesia yang semakin tua dan menjadi kurang mendapat nilai ekonomis.

Pasokan gas untuk kebutuhan domestik secara rata-rata meningkat sebesar 9,5% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik terhitung sebesar 3.997 miliar british thermal unit per day

⁹Energi Panas Bumi di Indonesia - Geothermal ITB http://geothermal.itb.ac.id/sites/default/files/public/Sekilas_tentang_Panas_Bumi.pdf

¹⁰ ibid

¹¹ Ibid., 26

¹²Kajian Dampak Pembatasan Ekspor Gas dan Batubara terhadap Perekonomian Indonesia. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2013.

("Bbtud") (58,3%), melebihi volume untuk ekspor sebesar 2.860 Bbtud (41,7%).¹³

Cadangan gas bumi nasional tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Total cadangan gas bumi pada tahun 2015 sebesar 150,39triliun kaki kubik(TSCF), di mana cadangan terbukti berkisar 101,54 TSCF, sedangkan cadangan potensial berkisar 48,85 TSCF. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, cadangan gas bumi nasional mengalami peningkatan berkisar 1,36% atau sebanyak 2,03 TSCF¹⁴ pada tahun 2014. Cadangan gas Indonesia hanya 1,6 persen dari total cadangan gas yang ada di dunia dan menempati posisi ke 14 dari negara yang memiliki cadangan gas terbesar dunia.¹⁵

Tahun 2016 penyaluran gas untuk kebutuhan domestik adalah sebesar 2.947 MMscfd sedangkan untuk ekspor sebesar 3.681 MMscfd. Pemanfaatan gas bumi Indonesia pada tahun 2016 dilakukan dalam berbagai bidang seperti kelistrikan sebanyak 14,61%, pupuk sebanyak 9,58%, industri sebanyak 23,26%, lifting minyak sebanyak 2,79%, pemakaian gas di kota sebanyak 0,04%, BBG Transportasi sebanyak 0,05%, ekspor gas pipa sebanyak 11,55%, LNG ekspor 29,36%, LNG domestik sebanyak 6,17%, dan LPG domestik sebanyak 2,58%.¹⁶

Latar Belakang MoU ASEAN on Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP)

Mengatasi perseteruan yang sering terjadi di antara negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, maka lima negara yang merupakan *founding father* ASEAN (*Association South East Asian Nations*), yaitu Adam Malik dari Indonesia, Thanat Koman dari Thailand, S. Raja

Ratnam dari Singapura, Narsisco Ramos dari Pilipina, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia berkumpul pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok menorehkan sejarah di regional Asia Tenggara membangun suatu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.

Sesuai dengan Deklarasi ASEAN, maka maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya di daerah.¹⁷ Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui taat menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

Sejak dibentuknya *Asosiasi South East Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi regional pada tahun 1967 di Bangkok.¹⁸ Negara-negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan.

Negara-negara Anggota ASEAN telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar berikut dalam hubungan mereka dengan satu sama lain, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC):

1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas

¹³SKK Migas Laporan Tahunan 2016, hlm 124.

¹⁴Indonesia Energi Outlook 2016, *Op cit.* hlm 17

¹⁵Kajian Dampak Pembatasan Ekspor Gas dan Btubara terhadap Perekonomian Indonesia.*Op cit*, hlm 27.

¹⁶SKK Migas Laporan Tahunan 2016, *Loc cit.*

¹⁷ Overview About ASEAN,

<http://www.asean.org/asean/about-asean>, diakses 25 Oktober 2017

¹⁸"The Trans-ASEAN Gas Pipeline – Accelerating Gas Market Integration within the ASEAN Region", *Op. cit*, hlm.2

- wilayah dan identitas nasional semua bangsa;
2. Hak setiap negara untuk memimpin nya nasional Keberadaan bebas dari campur tangan eksternal, subversi atau pemaksaan;
 3. Non-campur tangan dalam urusan internal satu sama lain;
 4. Penyelesaian perbedaan atau perselisihan dengan cara damai;
 5. Penolakan dari ancaman atau penggunaan kekuatan; dan kerja sama yang efektif di antara mereka sendiri.¹⁹

Kerja sama energi merupakan bentuk kesadaran ASEAN akan ekonomi di Asia Tenggara yang semakin berkembang, serta adanya potensi sumber daya energi yang beraneka ragam yang dimiliki oleh negara anggota ASEAN. Beberapa negara anggota ASEAN merupakan eksportir energi, importir energi, maupun yang mampu untuk mengembangkan sumber daya energi yang dimiliki, namun ada juga negara yang masih kurang dalam pengembangan sumber daya energi. Dalam peningkatan kerja sama energi ini, ASEAN berupaya untuk mendorong integrasi energi di Asia Tenggara sehingga potensi energi dimiliki dapat dimanfaatkan dengan efisien demi mewujudkan kerja sama ekonomi yang komprehensif. Pada akhirnya kerja sama energi ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Melalui kerja sama energi regional, persebaran akan potensi cadangan sumber daya energi yang tidak merata antar negara anggota ASEAN dapat diatasi dengan saling melengkapi kebutuhan energi satu sama lain. Secara keseluruhan, ASEAN memiliki 22 miliar barel cadangan minyak, 227 triliun kaki kubik cadangan gas alam, 46 miliar ton cadangan batubara, 234 gigawatt listrik tenaga air dan 20 gigawatt kapasitas panas bumi. Apabila dilihat dari

potensi ekonomi, pada tahun 2005 Produksi Domestik Bruto (PDB) negara anggota ASEAN mencapai 876 juta USD dan diperkirakan akan tumbuh mencapai 4,9% rata-rata pertahun di tahun 2030. Saat ini Asia Tenggara juga menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Asia, menyusul China dan India, dengan kombinasi PDB kesepuluh negara anggota ASEAN yang meningkat sekitar tiga perempat sejak tahun 2000. Pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara mempengaruhi peningkatan permintaan terhadap energi, sebab aktivitas ekonomi dan industri semakin meningkat.²⁰ Kerja sama energi regional dianggap penting bagi negara-negara ASEAN.

ASEAN telah menetapkan rencana aksi ASEAN yang disebut ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) 2004-2009, yang meliputi langkah-langkah: memperkuat ketahanan energi regional; meningkatkan integrasi infrastruktur energi regional; menciptakan kebijakan energi regional yang responsif yang secara bertahap mendorong reformasi pasar, liberalisasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan; melibatkan sektor swasta dalam upaya mengamankan cadangan energi regional.

Berkaitan dengan kerjasama energi ASEAN, terdapat 3 (tiga) dasar hukum yang menjadi rujukan, yaitu MoU on Trans ASEAN Gas Pipeline (MoU on TAGP), dan MOU on ASEAN Power Grid (MoU on APG).²¹ Kepala Sumber Daya Listrik ASEAN dan Otoritas (HAPUA) dipercayakan untuk memimpin ASEAN Power Grid sementara Dewan ASEAN pada Petroleum (ASCOPE) dipercayakan untuk menjadi ujung tombak Pipa Gas Trans-ASEAN (TAGP).

Pendanaan dalam pembangunan proyek Trans Asean Gas pipe Line (TAGP)

¹⁹Ibid

²⁰Harefa, A. *Posisi Indonesia Pada Kerjasama Energi Regional dalam Memasuki Era Masyarakat*

Ekonomi ASEAN. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie. 2016. hlm. 3.
²¹Kerjasama Ekonomi Asean, *Loc.cit*.

Berdasarkan pada Master Plan TAGP ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) pada tahun 2000, TAGP akan menggabungkan banyak proyek individu, yang melibatkan pembangunan sekitar 4.500 kilometer pipa, terutama bawah laut, bernilai sekitar USD 7 miliar. Proyek TAGP memberikan peluang untuk keterlibatan sektor swasta dalam hal investasi, termasuk pembiayaan dan transfer teknologi.²² Jaringan pipa gas menawarkan manfaat yang signifikan, baik dalam hal keamanan, fleksibilitas dan kualitas pasokan energi.

Trans Asean Gas Pipeline (TAGP)

Trans Asean Gas Pipeline (TAGP) adalah salah satu proyek infrastruktur utama yang disusun sebagai bagian dari ASEAN Vision 2020. TAGP bermula tahun 1994 ketika ASEAN menugaskan studi regional tentang rencana induk pengembangan dan pemanfaatan gas bumi. Studi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan gas melalui pipa bisa membawa tingginya tingkat pengembalian investasi dan merekomendasikan jaringan transmisi gas trans-ASEAN dari 8.000 sampai 10.000 kilometer dibangun dari tahun 2000 sampai 2020. Setelah disadari, TAGP memiliki potensi untuk menghubungkan hampir 80%²³ total gas kawasan ASEAN cadangan dan distribusi gas yang dimungkinkan melalui TAGP akan mengurangi ketergantungan wilayah pada minyak mentah.

TAGP bertujuan untuk menghubungkan infrastruktur pipa gas yang ada dan yang direncanakan di ASEAN, untuk mengangkut gas melintasi perbatasan untuk menjamin keamanan pasokan gas yang lebih besar. ASCOPE (Dewan Perminyakan ASEAN), bertanggung jawab atas pelaksanaan

Proyek TAGP yang efektif melalui beberapa sambungan interkoneksi dan regasifikasi mekanis fisik (RGT).

Adapun pencapaian yang dilakukan dan diselesaikan oleh tim tugas TAGP adalah:

1. Selesainya studi masterplan konseptual untuk proyek TAGP pada tahun 2000, yang telah disetujui oleh Dewan ASCOPE pada tahun 2001. Masterplan mengidentifikasi tujuh pipa mungkin gas baru antar-koneksi di ASEAN dan menjabat sebagai panduan yang berguna dalam pembangunan jangka panjang dari Jaringan Energi Trans-ASEAN ;
2. Pembentukan *ASEAN Gas Consultative Council* (AGCC) pada bulan Juli 2003. AGCC diciptakan terdiri dari perwakilan dari ASEAN pemerintah / penguasa dan ASCOPE untuk mengatasi masalah lintas batas yang berkaitan dengan integrasi pasar gas dan untuk memfasilitasi pelaksanaan proyek TAGP;
3. Pembuatan dan Penyelesaian MoU ASEAN pada TAGP pada Juni 2004. MoU memberikan kerangka kerja yang luas untuk Negara Anggota ASEAN untuk bekerja sama menuju realisasi proyek TAGP untuk membantu menjamin keamanan energi regional yang lebih besar.
4. Pendirian ASCOPE Gas Centre (AGC) di Malaysia yang berfungsi sebagai sumber daya informasi dan pengembangan kapasitas pusat strategis, teknis dan komersial dalam memfasilitasi pelaksanaan proyek TAGP; dan

²²

<http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20TAGP-3.pdf>,
Loc.Cit hal 16

²³Xunpeng SHI, "Assessment of ASEAN Energy Cooperation within the ASEAN Economic Community", ERIA Discussion Paper Series 37, 2013, hlm.18, <http://www.eria.org/ERIA-DP-2013-37.pdf>. Diakses pada 15 april 2018

5. Penyelesaian Model Penjualan Gas TAGP dan Perjanjian Pembelian serta Perjanjian transportasi gas.²⁴

Berdasarkan MoU TAGP, negara-negara ASEAN harus mempelajari kerangka peraturan dan kelembagaan untuk pasokan lintas batas, transportasi, dan distribusi gas alam di wilayah yang melibatkan negara-negara multilateral. Adapun strategi berbasis hasil dari TAGP adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas gas & LNG melalui terminal pipa dan regasifikasi.
2. Meningkatkan aksesibilitas gas & LNG melalui terminal pipa dan regasifikasi.
3. Meminimalkan dampak lingkungan dari CO₂ dan kontaminan lingkungan lainnya pada pengembangan dan pemanfaatan lapangan gas.²⁵

Proyek *Trans Asean Gas Pipeline* (TAGP) diharapkan dapat "membangun pengaturan interkoneksi mengenai listrik dan gas alam di ASEAN" untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan pasokan energi yang lebih besar di wilayah. Masterplan TAGP telah disiapkan dan ini berfungsi sebagai cetak biru dan aksi dalam melakukan proyek pipa gas di wilayah.

Struktur Organisasi *Trans ASEAN Gas Pipeline* (TAGP)

ASCOPE bertanggung jawab untuk melakukan program TAGP. Setiap negara anggota di ASEAN diwakili oleh organisasi perusahaan minyak nasional tiap Negara atau otoritas yang bertanggung jawab atas masalah minyak untuk melayani anggota Dewan ASCOPE. ASCOPE memiliki Komite Nasional yang di bentuk untuk menerapkan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat dan disetujui tiap

dewan ASCOPE. Komite Dewan ASCOPE memegang otoritas tertinggi dalam organisasi karena bertanggung jawab untuk tindakan organisasi dan untuk membimbing serta mengawasi semua program di bawah organisasi.²⁶ Komite Dewan ASCOPE dan Komite Nasional ASCOPE terdiri dari perusahaan minyak nasional atau wewenang dari setiap negara anggota ASEAN.

Negara-negara anggota *ASEAN Council of Petroleum* (ASCOPE) adalah Indonesia (Pertamina), Malaysia (Petronas), Philipina (Philippine National Oil Company), Singapura (Kapel Corporation) dan Thailand (PTT Public Company Limited) menjadi Negara pendiri ASCOPE. Brunai Darusalam (Petroleum Unit of the Prime Minister's Department) bergabung pada tahun 1985, yang sekarang berganti nama menjadi Petrolrum Brunei. Vietnam (Petro Vietnam) bergabung pada 5 November 1996. Myanmar (Myanmar Oil and Gas Enterprise) dan Kamboja (The Ministry of Mines and Energy) bergabung pada 14 Februari 2001. Laos (Lao State Fuel Company) bergabung pada tahun 2006.²⁷ Masing-masing negara mempunyai wakil tersendiri untuk mewakili negaranya di dalam kepengurusan ekspor impor dibidang Migas bagi anggota ASEAN

Jaringan *Trans ASEAN Gas Pipeline* (TAGP)

Berdasarkan Masterplan yang diperbarui pada 2015, TAGP bertujuan untuk membangun jaringan pipa sepanjang kurang lebih 7.000 kilometer, yang pada pembangunannya sebagian besar jaringan pipa merupakan jaringan lepas pantai dan bawah laut. Hingga Mei 2015, diperkirakan terdapat 3.631 kilometer jaringan pipa yang telah dibangun dan dioperasikan.

²⁴*Ibid*

²⁵Trans-ASEAN Gas Pipeline
<http://www.aseanenergy.org/programme-area/tagp/>,
diakses tanggal 25 Oktober 2017

²⁶Anton Setiawan. *Loc.cit*, hlm 7

²⁷*Ibid*

Selain itu, terdapat pula empat proyek dengan panjang sekitar 4.400²⁸ kilometer dan yang saat ini telah dalam studi kelayakan. Adapula proyek jaringan pipa lain dari East Natuna (Indonesia) ke Palawan (Filipina) yang dalam status ditangguhkan karena pertimbangan akan komersial dan ekonomi.

Perdagangan Indonesia dengan ASEAN

Perkembangan ekspor dan impor Indonesia ke negara ASEAN pada tahun 1995 sampai dengan 2013. Secara umum, baik ekspor maupun impor dalam periode tersebut menunjukkan tren yang meningkat. Nilai ekspor secara bertahap meningkat dari US\$6,4 milyar di tahun 1995 menjadi sekitar US\$40 milyar di tahun 2013. Pertumbuhan rata-rata ekspor Indonesia ke ASEAN mencapai 11,74 persen per tahun. Namun demikian, data di sisi impor juga menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni rata-rata 18,12 persen per tahun. Nilai impor meningkat dari US\$4,8 milyar menjadi US\$56,7 milyar dalam periode 1995-2013.²⁹ Hal ini menunjukkan pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan nilai ekspor dengan impor sehingga terjadi keseimbangan.

Indonesia membukukan angka net impor (defisit) sejak tahun 2003 hingga saat ini dimana defisit neraca perdagangan tersebut cenderung semakin meningkat.³⁰ Pada 2003, net impor Indonesia terhadap ASEAN hanya US\$3,42 Milyar, sementara pada 2013 net impor mencapai US\$15,89 Milyar.

Pada komoditas ekspor Indonesia dengan nilai terbesar ke ASEAN,

komoditas alam sangat mendominasi daftar tersebut, antara lain: Gas alam, batubara, sisa produk pertambangan minyak bumi, minyak mentah, minyak/lemak nabati, bijih timah, dan bijih tembaga. Komoditas lain yang juga memiliki nilai terbesar adalah kertas, kapal/perahu, dan kendaraan (sepeda motor).

Secara umum, komoditas dengan nilai net ekspor terbesar juga didominasi oleh komoditas alam unggulan Indonesia seperti gas alam, batubara, minyak/lemak nabati, minyak mentah, bijih timah, dan tembaga. Gas alam menyumbang nilai net ekspor terbesar dengan nilai US\$5,47 milyar diikuti batu bara senilai US\$3,36 Milyar.³¹

Kondisi Perekonomian Indonesia

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode tahun 2009-2012 tergolong cukup tinggi yaitu masih di atas 6 persen. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,23 persen, turun 0,26 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,49 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2011 sebesar Rp 2.465 triliun meningkat Rp 153 triliun menjadi Rp 2.618 triliun pada tahun 2012. Sektor yang menyumbang PDB terbesar masih dari sektor industri pengolahan yaitu sebesar 26 persen, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18 persen dan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sebesar 13 persen. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar 7 persen.³² Tahun 2011 sampai 2012 terjadi peningkatan

²⁸Anton Setiawan, Alya Shahroom, Ting Huang, Noor Syaza Zahidah, *The Complexities Of Programme Management: Case Study Of Trans-Asean Gas Pipeline*. PM World Journal The Complexities of Programme Management: Vol. V, Issue V – May 2016, hlm 5-6

²⁹Laporan Dampak Asean Economic Community Terhadap Sektor Industri Dan Jasa, Serta Tenaga Kerja Di Indonesia. hlm 26.

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20dampak%20asean.pdf>

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

³²Kajian Dampak Pembatasan Ekspor Gas dan Batubara terhadap Perekonomian Indonesia. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2013. *Op cit*, hlm 27

pendapatan produk domestik bruto dari beberapa sektor yang ada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :

- a) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
- b) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
- c) Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri.
- d) Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- e) Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta

memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.

- f) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang berorientasi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pola bagi hasil produksi Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah menerapkan Kontrak Bagi Hasil yang menggunakan mekanisme tanpa pengembalian biaya operasi³³ (Kontrak Bagi Hasil Gross Split).

Bahwa industri usaha hulu Minyak dan Gas Bumi memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri pada umumnya dengan tingkat risiko yang tinggi dan memerlukan waktu yang panjang serta investasi yang besar untuk menemukan cadangan Minyak dan Gas Bumi.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan ketentuan perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang dapat mendukung keekonomian sehingga meningkatkan investasi dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dan meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional.

Fasilitas perpajakan diberikan sejak masa Eksplorasi sampai dengan Kontraktor mencapai Produksi Komersial untuk membantu keekonomian proyek sehingga Kontraktor tidak terbebani pembayaran pajak ketika belum memperoleh

³³ Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan Kontrak bagi hasil gross split

³⁴*Ibid*

penghasilan. Untuk memberikan kepastian hukum, Peraturan Pemerintah ini juga akan diberlakukan terhadap Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dengan beberapa ketentuan peralihan.

Pajak yang dikenakan dalam perhitungan PPh migas berupa Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) sebesar 35% dan tarif Pajak atas Bunga, Dividen, dan Royalti (PBDR) sebesar 20%.

Dampak kerjasama TAGP terhadap Perekonomian Indonesia

Dampak yang di peroleh Indonesia dalam menjalin kerjasama dengan Anggota ASEAN dalam Trans Asean Gas Pipeline adalah sesuai dengan kepentingan nasional yang tertuang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019. Pertama, Indonesia bisa keluar dari negara berpenghasilan menengah dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030. Untuk mencapai hal itu pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh sekitar 6 – 8 persen per tahun. PDB per kapita sekitar US\$ 7.000, pengurangan angka kemiskinan 6 – 8 persen pada periode 2015 – 2019. Sasaran kedua adalah swasembada pangan dan ketiga adalah menciptakan ketahanan energi dengan meningkatkan peran energi terbarukan lebih besar.³⁵ Energi dari alam masih menjadi komoditas ekspor yang menyumbang cukup besar bagi pendapatan negara di karenakan Indonesia masih pada taraf negara berkembang.

Pemerintah memberikan komitmennya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya migas sebagai bahan bakudalam pembangunan nasional dengan mencantumkan target alokasi gas

bumi untuk kebutuha domestik yangmeningkat setiap tahunnya pada sasaran strategis "meningkatkan alokasi migas domestik". Terkait dengan halitu, di tahun 2016, di targetkan alokasi gas bumi untuk domestik sebesar 61% dan menyisakan volume eksporgas bumi sebesar 39%³⁶ dari keseluruhan pemanfaatan alokasi gas bumi.

Secara rata-rata industri migas menyumbang sekitar 21% dari pendapatan ekspor dan 30% dari pendapatan pemerintah. Penerimaan negara sub sektor migas pada tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 2013, porsi ekspor gas bumi Indonesia sebesar 28% melalui pipelinePangsa pasar ekspor gas melalui pipa sekitar 79% ke Singapore dan selebihnya ke Malaysia.³⁷ Sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi ekspor gas pipa sebanyak 11,55%.³⁸

Kesimpulan

Dinamika hubungan internasional beberapa tahun belakangan menarik untuk diamati, salah satunya yang terkait dengan penerimaan negara melalui sektor produk energi gas. Energi gas alam merupakan salah satu kebutuhan pokok pada saat ini sangat vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat namun menunjang beberapa sektor lainnya seperti industri, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan sebagainya.

Kebutuhan akan energi gas dilihat dari sisi permintaan akan berbanding lurus dengan pesatnya pertumbuhan sektor industrialisasi di suatu negara. Kemajuan industri suatu negara (manufaktur, keramik, semen, listrik, pupuk dan sebagainya) sangat ditentukan oleh ketersediaan energi penunjang (minyak dan gas).

Harga minyak per barel sebagai penunjang produksi industri sangat rentan sangat rentan stabilitasnya “vulnerability of price” dan sangat sulit diprediksi harganya

³⁵Outlook Energi Indonesia 2016

³⁶Laporan Kinerja Direktorat Minyak dan Gas 2016

³⁷Renstra Migas 2015-2019

³⁸SKK Migas Laporan Tahunan 2016

pada saat ini dan di masa depan karena ditentukan berbagai aspek seperti politik militer dan sistem ekonomi global. Hal tersebut tidak terjadi pada sistem energi gas dunia karena ketersediaan energi gas lebih stabil, harganya bisa diprediksi, dapat diprediksi di masa depan dan relatif kecil.

ASEAN memiliki fokus kerja pada peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya, kemajuan sosial dan perlindungan budaya, peningkatan intensitas kerja sama yang difokuskan pada bidang-bidang di atas, dan kerja sama lain di bidang teknologi dan informasi, pembangunan, kerja sama transnasional, dan keamanan.

Selain berfokus pada peningkatan kerja sama, ASEAN juga berfokus pada penyelesaian permasalahan yang terjadi antar negara-negara anggota ASEAN yang juga tetap didasari pada prinsip non-intervensi. Dalam hal ini, negara-negara di luar negara yang berkonflik tidak boleh mencampuri urusan negara-negara yang berkonflik tersebut. Negara anggota ASEAN dianjurkan untuk membantu hingga pada konteks yang dianggap tidak bersifat intervensionis dan mengganggu kedaulatan negara-negara yang sedang berkonflik.

ASCOPE adalah Asosiasi kerjasama perusahaan minyak dan gas bumi di kawasan ASEAN. ASCOPE bersaing aktif secara global di pasar internasional dengan menciptakan dan memfasilitasi peluang bisnis sinergis sambil aktif terlibat dalam perminyakan dan bisnis terkait minyak bumi. ASCOPE mempunyai beberapa Komite termasuk Komite Ekonomi yang mencakup kegiatan pengolahan dan pemasaran minyak dan gas bumi di kawasan ASEAN. Anggota ASCOPE terdiri dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei Darusalam, Philipina dan Thailand, Singapura, Myanmar dan Vietnam.

Penerimaan negara sub sektor migas pada tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 2013, porsi ekspor gas bumi Indonesia sebesar 28% melalui pipa dengan Pangsa pasar ekspor gas melalui pipa sekitar 79% ke Singapura dan selebihnya ke Malaysia. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi ekspor gas pipa sebanyak 11,55%. Dampak yang diberikan oleh TAGP (Trans Asean Gas Pipeline) bagi Indonesia sebagai berikut;

Peningkatan pendapatan nasional karena ekspor gas berdampak baik dalam peningkatan devisa negara dan pula mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memberikan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian RI. Mempermudah pengiriman gas yang dapat dilihat dari pangsa pasar gas ekspor yang masih dilakukan melalui jaringan pipa sebanyak 11,55% pada tahun 2016.

Peningkatan kerjasama regional dimana Indonesia sebagai negara penyedia gas alam akan meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara penerima gas dibidang energi khususnya gas alam. Selain penguatan hubungan kerjasamadiikuti dengan kerjasama di bidang lainnya seperti kendaraan, manufaktur, pertanian dan sebagainya.

Kerjasama ekspor gas alam yang memiliki peran terhadap penerimaan Negara yang akan dialokasikan berdasarkan penahapan skala prioritas dan strategi jangka menengahyang dimuat dalam RPJPN 2005—2025 dapat di digunakan sebagai upayapemantapan pembangunan secara menyeluruh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi mengatur tentang badan usaha minyak dan gas dalam pemamfaatan hasil alam. Dalam UU RI No 22 Tahun 2001 mencakup pemamfaatan hasil gas alam bagi kesejahteraan rakyat dalam eksplorasi dan eksploitasi guna meningkatkan pendapatan negara untuk

memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia.

Ketentuan perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil tanpa pengembalian biaya operasi yang dapat mendukung keekonomian sehingga meningkatkan investasi dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dan meningkatkan penemuan cadangan Minyak dan Gas Bumi nasional.

Industri usaha hulu Minyak dan Gas Bumi memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri pada umumnya dengan tingkat risiko yang tinggi dan memerlukan waktu yang panjang serta investasi yang besar untuk menemukan cadangan Minyak dan Gas Bumi merujuk pada Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan Kontrak bagi hasil gross split. Pendapatan dari Kegiatan Hulu Migas sebesar Rp.516.347.139.398,- pada tahun 2015.

Sektor gas alam tidak dapat menjadi andalan jangka panjang, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui akan habis bila tidak dikelola secara baik dan benar. Pengelolaan gas alam saat ini dimaksudkan untuk menjaga roda perekonomian Indonesia tetap berjalan. Pemamfaatan ini menunggu alih teknologi yang dapat menggantikan gas alam sebagai kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Kerjasama regional berdampak pada peningkatan devisa negara dalam berbagai sektor khususnya gas alam.

IV. Rekomendasi

Penulis menyadari adanya banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. penulis berharap agar adanya penulisan skripsi ini dapat mengembangkan dan menyempurnakan pembahasan tentang

dampak dari kerjasama *Trans Asean Gas Pipeline* (TAGP) terhadap perekonomian di Indonesia.

Kegiatan ekspor telah menjadi kebutuhan negara untuk melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Indonesia dengan kekayaan alamnya memanfaatkan hasil agraris untuk di ekspor ke luar negeri dan mendapatkan hasil yang signifikan bagi perekonomian Indonesia.

V. Referensi

- Larasati dwiki. 2015. *Meninjau Strategi Keamanan Energi Asean Melalui Tagp Menuju Interaksi Global*. Universitas Pembangunan Nasional VETERAN .Jawa timur. Surabaya
- TheTrans-ASEAN Gas Pipeline Accelerating Gas Market Integration within the ASEAN Region
- Farid, Muchammad. Keamanan Energi Dalam Politik Luar Negeri Indonesia *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference* ^{2nd}
- International Energy Agency*
<https://www.iea.org/topics/energysecurity/>
- Indonesia Energy Outlook 2015
- Outlook Energi Indonesia 2016.
- Renstra Migas 2015-2019.
- PLTB Sidrap, Pembangkit Listrik Tenaga Angin Terbesar di Indonesia
<http://ebtke.esdm.go.id/post/2017/09/30/1759/pltb.sidrap.pembangkit.listrik.tenaga.angin.terbesar.di.indonesia>
- Energi Panas Bumi di Indonesia - Geothermal
ITB http://geothermal.itb.ac.id/sites/default/files/public/Sekilas_tentang_Panas_Bumi.pdf

Kajian Dampak Pembatasan Ekspor Gas dan Batubara terhadap Perekonomian Indonesia. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2013.

SKK Migas Laporan Tahunan 2016.

Overview About ASEAN,
<http://www.asean.org/asean/about-asean>,

Harefa, A. Posisi Indonesia Pada Kerjasama Energi Regional dalam Memasuki Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie. 2016. hlm. 3.

Kerjasama Ekonomi Asean,
<http://www.kemlu.go.id/Documents/Kerjasama%20Ekonomi%20ASEAN.doc>

Trans-ASEAN Gas Pipeline *Securing Long Term Energy Supply for the Region*
<http://www.asean.org/storage/images/2015/October/outreach-document/Edited%20TAGP-3.pdf>

Xunpeng SHI, "Assessment of ASEAN Energy Cooperation within the ASEAN Economic Community", ERIA Discussion Paper Series 37, 2013, hlm.18, <http://www.eria.org/ERIA-DP-2013-37.pdf>. Diakses pada 15 april 2018

Trans-ASEAN Gas Pipeline
<http://www.aseanenergy.org/programme-area/tagp/>, diakses tanggal 25 Oktober 2017

Anton Setiawan, Alya Shahroom, Ting Huang, Noor Syaza Zahidah, The Complexities Of Programme Management: Case Study Of Trans-Asean Gas Pipeline. PM World Journal The Complexities of Programme Management: Vol. V, Issue V – May 2016, hlm 5-6

Laporan Dampak Asean Economic Community Terhadap Sektor Industri Dan Jasa, Serta Tenaga Kerja Di

Indonesia. hlm 26.
<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/kajian%20dampak%20asean.pdf>

Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 53 tahun 2017 tentang perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan Kontrak bagi hasil gross split

Laporan Kinerja Direktorat Minyak dan Gas 2016